



Accepted: October 2024	Revised: January 2025	Published: February 2025
----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Analisis Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama

Aziza Rahmah

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Payakumbuh, Indonesia

e-mail: azizarahmah2001@gmail.com

Velly Syafriani

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2, Lareh Sago Halaban, Indonesia

e-mail: vellysyafriani22@gmail.com

Asmendri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

e-mail: asmendri@uinmybatusangkar.ac.id

Milya Sari

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

e-mail: milyasari@uinib.ac.id

Abstract

The aim of this study is to examine the planning used by UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban in education financing. This research employs a qualitative method with data collection techniques including interviews and documentation. The research was conducted at UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban. The study focuses on the education financing planning at the school, covering the grouping, classification, and utilization of education funds sourced from the Central Government (BOS funds), the Local Government, and contributions from students' parents managed by the school committee. Financing is divided into direct costs (related to the education process), routine costs (using BOS funds), and indirect costs (funded by parental contributions). The RAPBS preparation strategy begins with identifying the funding sources, gathering needs proposals from the school community, drafting by the treasurer and BOS team, followed by meetings with the school committee for revisions and the final approval of the RAPBS. In conclusion, the education financing planning at this school is well-structured; however, it is recommended to enhance transparency and the participation of the school committee in every stage of the RAPBS preparation.

Keywords: *Planning; Management; Education Financing.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan yang digunakan UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban dalam pembiayaan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban. Penelitian ini membahas perencanaan pembiayaan pendidikan di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban. Prosesnya meliputi pengelompokan, penggolongan, dan pendayagunaan dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Pusat (Dana BOS) dan Pemerintah Daerah, serta sumbangan dari orang tua siswa yang dikelola oleh komite sekolah. Pembiayaan terbagi menjadi biaya langsung (terkait dengan proses pendidikan), biaya rutin (menggunakan dana BOS), dan biaya tidak langsung (dibiayai oleh sumbangan orang tua). Strategi penyusunan RAPBS dimulai dengan identifikasi sumber dana, pengumpulan usulan kebutuhan dari warga sekolah, penyusunan draf oleh bendahara dan tim BOS, dilanjutkan dengan rapat bersama komite sekolah untuk revisi dan pengesahan RAPBS. Kesimpulannya, perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah ini sudah terstruktur dengan baik, namun disarankan untuk memperkuat transparansi dan partisipasi komite sekolah dalam setiap tahap penyusunan RAPBS.

Kata Kunci : Perencanaan; Pengelolaan; Pembiayaan Pendidikan

Pendahuluan

Dengan adanya persoalan pemerataan di bidang pendidikan yg masih sulit diatasi, ada anak-anak pada usia sekolah yg tidak mendapatkan pendidikan yg layak. Dengan adanya dilema efisiensi serta relevansi pendidikan pada sekolah tentunya memiliki kaitan pribadi menggunakan konsep pembiayaan yg bukan hanya jumlah tetapi terletak pula di kualitasnya. dengan tindakan mengupayakan perencanaan pembiayaan pendidikan secara irit dengan mengorbankan uang (*cost*) yg kecil atau minimal tetapi hasil (produk)-nya baik serta tinggi. Hal ini selaras menggunakan pendapat yang disampaikan Mulyasa, bahwasanya semua aktivitas yg terlaksana pada sekolah pastinya membutuhkan porto, baik itu disadari ataupun tidak (Mulyasa, 2011).

Perencanaan pembiayaan pendidikan saat ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan mutu pendidikan yang masih menjadi perhatian banyak pihak, apalagi output pendidikan belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu, perencanaan ini harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur biaya yang menunjang terselenggaranya pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada biaya yang dikeluarkan, oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan yang tepat agar proses pendidikan dapat berjalan lancar sesuai rencana yang telah dibuat. Dalam konteks ini, efisiensi dan relevansi pendidikan harus dipadukan dengan kemampuan pengelola pendidikan dalam menggunakan dana yang tersedia untuk pengembangan pendidikan secara optimal. Oleh karena itu, memikirkan efisiensi dan relevansi antara biaya dan kualitas pendidikan menjadikan produktivitas sebagai parameter utama untuk menunjukkan sejauh mana efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan global (Usman, 2014).

Perencanaan pembiayaan pendidikan ini merinci alokasi dana yg akan dipergunakan dalam kegiatan pendidikan dalam periode ketika eksklusif, biasanya satu tahun. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ini sangat krusial karena sebagai pedoman pada pengelolaan keuangan pendidikan, baik pada tingkat pusat (nasional) maupun wilayah. RAPBS mempunyai kiprah yg sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan perencanaan yg baik serta pengelolaan yang efektif, RAPBS dapat memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki

kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan yang berkualitas. Sekolah/Madrasah artinya forum yg berkecimpung pada Bidang Pendidikan dimana pada pengelolaannya harus mempunyai rancangan anggaran pendapatan serta belanja sekolah/madrasah yang merupakan *blueprint* keuangan bagi sebuah sekolah/madrasah. pada dalamnya, tercantum secara rinci mengenai pendapatan sekolah/madrasah serta belanja sekolah/madrasah.

RAPBS/M Memastikan setiap rupiah yg masuk ke sekolah digunakan secara efektif dan efisien. membentuk pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih transparan serta akuntabel. Membuka ruang bagi semua komponen sekolah (guru, peserta didik, komite sekolah, serta masyarakat) buat berpartisipasi pada pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran. RAPBS dan RAPBM bisa mengidentifikasi kinerja keuangan lembaga pendidikan. dengan menyusun dan melaksanakan RAPBS atau RAPBM menggunakan baik, diperlukan kualitas pendidikan pada Indonesia bisa terus meningkat dengan adanya seni manajemen yang pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mewawancarai bendahara sekolah untuk menganalisis proses perencanaan pembiayaan pendidikan di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban. Dari jawaban yang diberikan bendahara sekolah, proses perencanaan pembiayaan pendidikan yaitu Pengelompokan, Penggolongan dan Pendayagunaan Pendanaan Pendidikan serta Strategi Penyusunan RAPBS. Terdapat strategi dalam penyusunan sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni dana BOS dan sumber pembiayaan pendidikan berasal dari orang tua/wali siswa yakni sumbangan wali murid/orang tua yang dikelola oleh komite sekolah. Menurut peneliti, perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban belum terencana secara efektif dan efisien. Karena belum maksimal dan terdapat beberapa kendala, maka pihak sekolah harus mengkaji bagaimana agar perencanaan pembiayaan pendidikan bisa terencana secara efektif dan efisien. Dan bisa membawa kemajuan untuk lembaga pendidikan tersebut.

Dengan dibuatnya jurnal ini berdasarkan apa yang diteliti, peneliti berharap bisa mengidentifikasi perencanaan pembiayaan pendidikan di UPTD SMP Negeri 2 Lareh Kecamatan Sago Halaban. Peneliti juga berharap dengan adanya jurnal penelitian ini memberikan dampak positif kepada perencanaan pembiayaan pendidikan di UPTD SMP Negeri 2 dan lembaga pendidikan lainnya. Metode studi pustaka akan diterapkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari artikel, buku, dan dokumen terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perencanaan pembiayaan pendidikan.

Adanya penelitian ini, diperlukan dalam menyampaikan wawasan yg lebih luas serta pemahaman yang lebih baik wacana perencanaan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini dibutuhkan agar dapat memberikan kontribusi pada pengembangan perencanaan pembiayaan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama dan bisa menjadi acuan bagi lembaga pendidikan lainnya untuk menaikkan seni manajemen perencanaan pembiayaan pendidikan yg lebih efektif dan efisien.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena-fenomena tertentu yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara keseluruhan. Pendekatan ini menggambarkan fakta-fakta yang ada secara deskriptif, menggunakan kata-kata dan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tujuan Analisis Perencanaan Pembiayaan

Pendidikan di UPTD SMP Negeri 2 Lareh Kecamatan Sago Halaban. Tujuan keseluruhan penelitian kualitatif adalah mengumpulkan informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian (Creswell, 2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berfungsi menggambarkan realitas terkait Analisis Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di UPTD SMP Negeri 2. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bendahara Sekolah Ibu Rita Sari Dewi, S.Pd sebagai informan *key person* diharapkan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, pat memberikan penjelasan analisis yang akurat. Selain itu, data sekunder berupa foto yang relevan juga akan digunakan dalam analisis. Teknik Penjaminan Keabsahan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Teknik Pengumpulan Data. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan observasi lalu dicek dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Pengelompokan, Penggolongan, dan Pendayagunaan Pendanaan Pendidikan

Temuan terkait pengelompokan, penggolongan, dan pendayagunaan dana pendidikan di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban dapat dihubungkan dengan beberapa teori tentang pembiayaan pendidikan. Salah satu teori yang relevan adalah teori pendanaan pendidikan, yang menyatakan bahwa sumber dana pendidikan dapat berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, terutama orang tua siswa (Suryadi, 2013). Penelitian ini menemukan bahwa sekolah tersebut memanfaatkan dua sumber utama, yaitu dana BOS dari pemerintah pusat dan sumbangan orang tua yang dikelola oleh komite sekolah, yang sejalan dengan teori ini.

Selain itu, penggunaan dana BOS untuk biaya rutin dan langsung yang terkait dengan proses pendidikan mencerminkan prinsip efisiensi yang juga dijelaskan dalam literatur sebelumnya. Teori pendanaan pendidikan menekankan pentingnya penggunaan dana yang tepat sasaran untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan operasional sekolah (Haris, 2010). Di sisi lain, pengelolaan dana dari sumbangan orang tua untuk biaya tidak langsung, seperti kebutuhan yang tidak dapat dibayar dengan dana BOS, menunjukkan pendekatan partisipatif dalam pembiayaan pendidikan yang diajukan oleh sejumlah ahli pendidikan (Nurdin, 2016). Peran orang tua dalam pembiayaan pendidikan memperkuat kolaborasi antara sekolah dan masyarakat, yang sejalan dengan teori pendidikan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, temuan ini mendukung pandangan dalam literatur yang menekankan pentingnya pembiayaan pendidikan yang bersumber dari berbagai pihak dan dikelola dengan transparansi serta melibatkan masyarakat. Memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan, Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keberlanjutan dan kualitas pendidikan di tingkat sekolah. Dalam penganggaran dana yang telah diterima, dana itu digunakan untuk:

1. Penggunaan dana BOS:
 1. Pembayaran honorarium tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS.
 2. Pembelian buku teks pelajaran.
 3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
 4. Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah.
 5. Pembelian bahan habis pakai.

6. Pembiayaan langganan daya dan jasa (listrik, internet).
 7. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
 8. Pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (pelatihan, workshop).
 9. Pembelian alat-alat pendidikan.
 10. Dukungan kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
2. Penggunaan dana sumbangan orang tua, untuk membiayai kebutuhan yang tidak bisa di-cover oleh dana BOS, misalnya digunakan untuk pembelian makanan minum harian guru, pembayaran honor pendidik dan tenaga pendidik yang belum terdata di Dapodik, sehingga honorinya tidak bisa dibayarkan dengan dana BOS.

Berasal dari pernyataan yg diberikan oleh narasumber diatas terbukti bahwa Pembiayaan Pendidikan mempunyai beberapa asal dana yang dapat di alokasi di pembiayaan pendidikan, di temukan pada UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri dua Kecamatan Lareh Sago Halaban diantaranya tergolong atas sumber dana oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemda yakni dana BOS serta sumber dana oleh orang tua / wali siswa berupa dana sumbangan orang tua.

Hasil wawancara dengan bendahara sekolah UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban yakni Ibu Rita Sari Dewi, S.Pd mengungkapkan bahwa : Dalam penganggaran dana yang telah diterima, dana itu digunakan untuk jenis biaya yang berbeda. Untuk sumber dana yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni dana BOS, dana tersebut digunakan pada jenis biaya langsung (*direct cost*) dan untuk sumber dana biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua / wali siswa berupa dana sumbangan orang tua, dana tersebut digunakan untuk jenis biaya tidak langsung (*indirect cost*) dalam membiayai kebutuhan yang tidak bisa di-cover oleh dana BOS. Sesuai dengan pendapat Anwar dalam buku Pratiwi Bernadetta jenis-jenis biaya pendidikan dibedakan menjadi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*) (Purba, 2020).

Menurut Fatah, sumber pembiayaan sekolah dapat berasal dari orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan mantan siswa (Fattah, 2000). Namun Anwar juga menyatakan bahwa identifikasi sumber pendanaan merupakan bagian dari proses penyusunan anggaran (Anwar, 2019).

Strategi Penyusunan RAPBS

Setiap sekolah atau madrasah diharuskan untuk menyusun rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Rencana Kerja Tahunan harus mencakup rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk satu tahun. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) adalah dokumen yang merinci sumber-sumber pendanaan pendidikan dari berbagai asal dan mencakup program kerja tahunan yang terdiri dari aktivitas rutin dan kegiatan lainnya, lengkap dengan rincian rencana pembiayaannya untuk satu tahun (Rusdiana, 2013).

RAPBS merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuangan sekolah karena membantu mengatur dan mengarahkan penggunaan dana secara efektif dan efisien. Dalam penyusunan RAPBS, sekolah sebaiknya melibatkan berbagai pihak terkait, seperti komite sekolah, orang tua siswa, serta guru dan staf (Zahrudin, Arifin, Z., 2019). Dengan melibatkan pihak-pihak ini, sekolah dapat memperoleh masukan dan dukungan yang diperlukan untuk menyusun RAPBS yang akurat dan diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan penelitian di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RAPBS mencakup kepala sekolah, seluruh majelis guru, pegawai tata usaha, penjaga sekolah, satpam, dan komite. Ini sejalan dengan pendapat Tampubolon, yang menyatakan bahwa dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah perlu melibatkan yayasan, guru, komite, staf, dan komunitas sekolah (Tampubolon, 2015). Hal serupa juga diungkapkan oleh Yulianti (2017) dalam jurnal berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMP,” yang menyebutkan bahwa perencanaan pembiayaan di SMP Negeri 2 Lubuklinggau melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, pengurus, ketua komite, dan wali murid. Amri (2015) dalam jurnal “Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Terpencil” juga mencatat bahwa RAPBS disusun oleh sekolah dengan melibatkan guru, staf tata usaha, dan komite sekolah.



Gambar 1. Rapat penyusunan RAPBS yang melibatkan seluruh unsur sekolah

Sementara itu, pada penyusunan perencanaan keuangan sekolah, sekolah sudah sepenuhnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yg berkaitan menggunakan perencanaan keuangan sekolah, sebagai akibatnya berdasarkan (Mulyasa, 2002), perencanaan keuangan sekolah setidaknya mencakup dua fungsi, yaitu penyusunan aturan serta pengembangan rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS). Berikut pernyataan narasumber yang telah diwawancarai mengenai sistem pembagian pada pengeluaran dana untuk pembiayaan sekolah yang berasal dari dana BOS:

1. Untuk gaji tenaga honorer, baik guru, tenaga kependidikan, penjaga sekolah dan satpam sekolah yang terdata di Dapodik
2. Untuk biaya operasional sekolah: tagihan Listrik, biaya *wifi*, dan pemeliharaan fasilitas yang rusak
3. Pembelian barang dan jasa. Baik itu belanja modal atau belanja habis pakai
4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: transportasi lomba, biaya konsumsi siswa yang ikut lomba, biaya kegiatan di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain
5. Kegiatan peningkatan mutu guru: dengan menganggarkan transportasi kegiatan MGMP atau honor untuk narasumber kegiatan lokakarya

Kemudian, diterangkan juga oleh Ibu Rita Sari Dewi, S.Pd mengenai sistem pembagian dan pengeluaran dana untuk pembiayaan sekolah yang berasal dari sumbangan orang tua yang dikelola komite:

1. Untuk gaji tenaga pendidik dan kependidikan yang belum terdata di Dapodik

2. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak bisa dianggarkan di BOS misalnya, pembelian makan dan minum harian
3. Pengeluaran yang tidak terduga

Untuk menyusun RAPBS secara efektif, diperlukan keterampilan manajerial dengan model pengambilan keputusan yang terintegrasi. Hal ini melibatkan penentuan dan pengembangan tujuan institusi, pemilihan keterampilan, kapasitas, serta pengetahuan yang diperlukan oleh warga sekolah di masa mendatang, respons cepat terhadap peluang dan ancaman, serta mendorong komitmen semua pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas sekolah secara bersama-sama.

Di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban, berdasarkan temuan peneliti, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan RAPBS hingga ditetapkan menjadi APBS.

1. Tahap pertama adalah mengidentifikasi sumber dana dan jumlahnya untuk tahun anggaran, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Anwar, di mana identifikasi kegiatan merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran (Anwar, 2019). Pendapat Anwar didukung oleh Suharsaputra, yang menyebutkan bahwa langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah inventarisasi program atau kegiatan sekolah selama satu tahun anggaran (Suharsaputra, 2010).
2. Masing-masing warga sekolah menuliskan usulan kebutuhan yang akan mereka perlukan dalam satu tahun ke depan. Misalnya guru seni budaya, mengusulkan pembelian alat music, baju tari atau perlengkapan lainnya. Begitu juga dengan guru olahraga dan guru mata Pelajaran lainnya. Tenaga kependidikan juga mencatat semua kebutuhan kertas dan ATK yang akan mereka butuhkan dalam satu tahun ke depan. Penjaga sekolah dan satpam sekolah juga.
3. Dilakukan rapat penyusunan RAPBS yang melibatkan seluruh unsur sekolah
4. Bendahara dan tim bos menyusun draf RAPBS
5. Draf yang telah disusun di bawa ke rapat yang dihadiri oleh komite sekolah. Di dalam rapat dilakukan revisi sesuai saran dari komite dan unsur sekolah lainnya.
6. RAPBS disahkan

Sesuai dengan pernyataan (Herawati, 2023), pada awal tahun ajaran baru, kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun program kerja. Dalam rapat tersebut, kepala sekolah menginstruksikan setiap wakil kepala sekolah dan semua unsur sekolah untuk melakukan identifikasi kebutuhan di masing-masing bidang.

Setelah anggaran pendapatan dan belanja disusun, tahap terakhir adalah penyusunan laporan RAPBS yang berisi rincian anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Laporan ini biasanya disampaikan kepada pihak terkait, seperti struktural sekolah atau pengawas, untuk mendapatkan persetujuan dan supervisi. Penyusunan laporan RAPBS menandakan tahap akhir dalam proses penganggaran (Rekasari, 2020) dan berfungsi untuk menggambarkan secara rinci anggaran yang telah disusun.

Laporan RAPBS adalah langkah penting dalam penganggaran pendapatan dan belanja sekolah. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai alat supervisi dan evaluasi untuk memastikan penggunaan dana sekolah dilakukan dengan baik. Dalam penyusunan laporan RAPBS, ada beberapa langkah yang perlu diikuti:

1. *Pertama*, informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja yang telah disusun harus dikumpulkan secara akurat. Data yang diperoleh harus lengkap dan valid agar laporan RAPBS dapat diandalkan.

2. Selanjutnya, data tersebut perlu diorganisir dan disusun sesuai format yang telah ditentukan. Rincian pendapatan dan belanja harus disajikan dengan jelas dan sistematis agar mudah dipahami oleh pihak terkait.
3. Laporan RAPBS harus mencakup semua aspek anggaran pendapatan dan belanja, termasuk sumber pendapatan, alokasi dana, pengeluaran, dan rencana penggunaan dana. Semua informasi ini harus disampaikan dengan lengkap dan transparan untuk memudahkan proses persetujuan dan supervisi.
4. Setelah laporan selesai disusun, RAPBS harus disampaikan kepada pihak terkait, seperti dewan sekolah atau pengawas. Laporan ini akan menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
5. Pihak terkait akan menganalisis laporan RAPBS untuk memastikan bahwa rencana yang diajukan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan penggunaan dana sudah sesuai dengan rencana. Mereka juga akan melakukan supervisi untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara transparan dan tepat sasaran.
6. Dalam proses persetujuan dan supervisi, pihak terkait juga dapat memberikan saran atau rekomendasi mengenai penggunaan anggaran agar lebih efisien dan efektif, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan oleh sekolah.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengawasan dan evaluasi secara berkala sangat penting dalam pengelolaan anggaran di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban setelah anggaran disusun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendapatan yang diterima sesuai dengan rencana serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau perubahan yang mungkin timbul. Kendala yang ditemukan adalah bahwa sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendeteksi ketidaksesuaian atau penyimpangan, khususnya terkait dana BOS dan sumbangan dari orang tua siswa.

Proses pertanggungjawaban dana BOS, yang dimulai dari bendahara (tim BOS) ke kepala sekolah, dan kemudian dilaporkan ke dinas pendidikan, serta pertanggungjawaban dana sumbangan komite yang melibatkan bendahara komite, kepala sekolah, dan ketua komite, menunjukkan bahwa alur pelaporan sudah terstruktur dengan baik. Namun, kendala yang ada adalah terbatasnya waktu dan sumber daya untuk pengawasan yang menyeluruh, serta kurangnya pelatihan bagi pihak terkait dalam pengelolaan keuangan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya perbaikan dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi pengelolaan anggaran, baik dana BOS maupun sumbangan orang tua. Kebijakan yang disarankan adalah meningkatkan pelatihan untuk bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah agar mereka lebih memahami pengelolaan keuangan dan pelaporan yang transparan. Selain itu, perlu ada penguatan sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan melibatkan pihak eksternal, seperti audit independen, untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan.

Solusi yang bisa diterapkan adalah memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan rutin dan peningkatan pengawasan berbasis teknologi informasi, yang akan memungkinkan pemantauan anggaran dan penggunaan dana secara lebih transparan dan efisien. Selain itu, peran komite sekolah dalam evaluasi anggaran dan laporan keuangan perlu diperkuat agar mereka lebih aktif terlibat dalam proses pertanggungjawaban. Tentunya, narasumber mengemukakan bahwa terdapat beberapa hambatan yang timbul ketika penyusunan RAPBS di UPTD SMP Negeri dua Kecamatan Lareh Sago Halaban yakni adanya kendala dalam penyusunan anggaran artinya penganggaran tak dapat

menampung semua usulan rencana yg diajukan oleh pendidik juga energi kependidikan. Sulitnya menentukan skala prioritas sebab semua unsur sekolah menginginkan usulan mereka yg dimasukkan pada perencanaan penganggaran. Terjadinya kenaikan harga barang, ketika perencanaan dan pembelanjaan.

Kemudian, beliau memaparkan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yang mana menjadi sebuah solusi yang dilakukan UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban dalam mengatasi kendala yang timbul yakni:

1. Tim bos wajib menganalisis setiap usulan perencanaan penganggaran yang diajukan sang seluruh unsur sekolah lalu di susun sesuai menggunakan skala prioritas, contohnya buat kegiatan A dan B, mana yang lebih krusial di dahulukan maka itu yg dimasukkan pada rencana pembiayaan. Dahulukan dulu kebutuhan yang mendesak dan meminta guru atau pegawai yang usulannya tidak mampu dimasukkan dalam RAPBS agar dapat bersabar menunggu, hingga usulannya tertuang di tahun berikutnya. Pernyataan ini didukung oleh Muhaimin, yang menyatakan bahwa penyusunan rencana harus berlandaskan pada skala prioritas saat kegiatan dilaksanakan (Muhaimin, 2012). Mustari juga mengemukakan hal serupa, bahwa dalam menyusun anggaran, sekolah sebaiknya dengan cermat memprioritaskan pengeluaran dana sesuai dengan rencana pengembangan sekolah (Mustari. M, 2013).
2. Cara mengatasi kendala kenaikan harga barang, adalah dengan menurunkan kualitas barang sesuai dengan harga yang telah di tetapkan

Penutup

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman perencanaan pembiayaan pendidikan di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber dana pendidikan di sekolah ini berasal dari dana BOS yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sumbangan dari orang tua siswa yang dikelola oleh komite sekolah. Pembiayaan ini terbagi menjadi biaya langsung yang digunakan untuk keperluan pendidikan (biaya rutin dari dana BOS) dan biaya tidak langsung yang didanai melalui sumbangan orang tua.

Proses penyusunan RAPBS yang melibatkan seluruh elemen sekolah, dengan mengidentifikasi sumber dana di awal tahun anggaran, merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan perencanaan yang matang. Keterlibatan tim BOS, bendahara, dan komite sekolah dalam penyusunan ini menggambarkan pentingnya kerja sama dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana. Meskipun terdapat alur pertanggungjawaban yang jelas, masih dibutuhkan pengawasan yang lebih mendalam dan pelatihan intensif bagi pihak terkait seperti bendahara, kepala sekolah, dan komite untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dari segi kebijakan, temuan ini relevan untuk pengembangan kebijakan di tingkat sekolah dan daerah. Salah satu saran yang bisa diusulkan adalah penguatan sistem pengawasan menggunakan teknologi dan pelatihan berkelanjutan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, melibatkan pihak eksternal, seperti audit independen, bisa menjadi langkah untuk memastikan dana digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan.

Penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas sistem pengawasan dan pelatihan yang diterapkan, serta mengeksplorasi kontribusi masyarakat dalam pembiayaan

pendidikan yang lebih berkelanjutan. Ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebijakan dan strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan dan perencanaan dana yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Amri (2015) 'Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah', *Jurnal Manajer Pendidikan*, 9 (2).
- Anwar, M.I. (2019) *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Creswell, J. (2017) *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faslah, Deni. Mujahid, Nendi Syahrul. Urgensi dan Langkah-langkah Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah RAPBS. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2).
- Fattah, N. (2000) *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Haris, M. (2010). *Teori Pendanaan Pendidikan: Prinsip dan Penerapan dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pendidikan Indonesia.
- Herawati, P.R. (2023) 'Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja di SMK Taman Sidoarjo', *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3 (2).
- Moleong (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin (2012) *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana.
- Mulyasa, E. (2002) *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep, Model dan Aplikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2011) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustari. M (2013) *Manajemen Pendidikan: Dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Arsad Press.
- Nurdin, S. (2016). *Pendekatan Partisipatif dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Peran Orang Tua dalam Mendukung Keberlanjutan Pendidikan Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 (2005). Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Purba, P.B. (2020) *Dasar Dasar Manajemen Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rekasari, M.H. (2020) 'Efektifitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Study Evaluatif di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan)', *Jurnal Ilmiah Manajemen Program Pascasarjana*, 14 (1).
- Rusdiana, W. (2013) *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Bandung: Arsad Press.
- Suharsa putra (2010) *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryadi, A. (2013). *Pendanaan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tampubolon, M. (2015) *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Usman, A.S. (2014) 'Meningkatkan Mutu Pendidikan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah', *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 15(1), pp. 13–31.

- Yulianti, E. (2017) 'Manajemen Pembiayaan di SMP', *Jurnal Manajer Pendidikan*, 11(4).
- Zahrudin, Arifin, Z., S. (2019) *Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.